



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 4102-4115

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Komparatif Sistem Pemungutan Suara: Efektivitas Situng dan Sirekap dalam Proses Pemilu di DKI Jakarta

Nurain^{1✉}, Andini Nathania Putri², Apvira Azhari Siregar³, Firman⁴

Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: 2310413119@mahasiswa.upnvj.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui perbandingan keefektifan SITUNG dan SIREKAP dalam proses pemilu di DKI Jakarta. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode studi banding dengan jenis penelitian kualitatif karena membandingkan nilai efektivitas 2 variabel (SITUNG dan SIREKAP). Hasil penelitian menunjukkan penggunaan SITUNG dalam proses rekapitulasi suara masih menjadi kontroversial, karena hadirnya kesalahan teknis yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam proses memasukkan data ke dalam SITUNG yang mengakibatkan ketidakpercayaan dan kecurigaan publik. penggunaan aplikasi SIREKAP dalam proses Pilpres 2024. Munculnya ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil pemilu yang dihitung melalui aplikasi SIREKAP dan kurangnya kesiapan aplikasi dan dukungan terhadap penggunaan aplikasi membuat aplikasi SIREKAP menjadi perhatian penulis untuk dibahas dalam penelitian ini.

Kata Kunci: *Pemilu, Pemungutan Suara, Situng, Sirekap*

Abstrak

This research aims to compare the effectiveness of SITUNG and SIREKAP in the election process in DKI Jakarta. The method used in this research is a comparative study method with a qualitative research type because it compares the effectiveness value of 2 variables (SITUNG and SIREKAP). The results showed that the use of SITUNG in the vote recapitulation process was controversial, due to the presence of technical errors made by election organisers in the process of entering data into SITUNG which resulted in public distrust and suspicion. the use of the SIREKAP application in the 2024 presidential election process. The emergence of public dissatisfaction with the election results calculated through the SIREKAP application and the lack of application readiness and support for the use of the application makes the SIREKAP application the author's concern to be discussed in this study.

Keywords: *Election, Voting, Situng, Sirekap*

PENDAHULUAN

Pemilu adalah salah satu strategi yang digunakan secara umum. Pemanfaatan ras di tengah metode pemilihan kepala negara masih menimbulkan polemik yang berbeda bagi Indonesia. Pada tahun 2014 Puskaptis dan JSI (Indonesian Voice Arrange) menyatakan bahwa suara terjadi antara pertandingan capres nomor 2, tepatnya Prabowo Subianto – Hatta Rajasa, bedi kandidat nomor 1 capres gabungan, Joko Widodo – Jusuf Kalla dengan perbedaan 1 banding 5%. Ada tujuh individu pengakuan yang menentang gagasan ini dengan Puskaptis dan JSI mengajar, ada individu kearifan berbeda yang menyatakan bahwa gabungan Joko Widodo-Jusuf Kalla dominan atas perbedaan 4-5%. Dimana ketujuh individu yang diakui antara lain Kompas Investigasi dan Penyempurnakan, CSIS, Populi Center, Radio Republik Indonesia, Lungkaran Survei, Indonesian Political Markers, dan Reseach Center Saiful Mujani. Untuk sementara, pada tahun 2019, media elektronik Beat mendapatkan pesan tentang kontras informasi tentang keputusan tahun 2019 di stasiun survei dan KPU Situng. Kontras dari informasi tersebut terdapat di TPS 193 Kota Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Dimana pengamanan dari masing-masing calon presiden beragam dari informasi yang disusun dalam KPU Situ. Jika di stasiun survei 193, presiden gabungan 01 mendapat 47 suara, sedangkan dari pasangan 02 mendapat 162 suara. Sementara itu, informasi yang disusun di KPU Situng muncul bahwa gabungan presiden 01 mendapatkan 180 suara dan pertandingan 02 mendapatkan 56 suara. Padahal setelah diikuti, ternyata fakta yang berlebihan terjadi karena kesalahan pada saat penyampaian informasi oleh KPU Situng.

Masalah ini muncul dalam jumlah suara yang datang dan pernyataan ulang akan ditanggihkan untuk diketahui semua pihak. Dalam pelaksanaan keputusan, kerangka kerja yang disebut SITUNG atau Kerangka Data Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum digunakan. Situng sendiri diadakan pada tahun 2004 dan dipergunakan dalam Pemilu 2019.

Kerangka kerja ini ada di situs resmi KPU di pemilu2019.kpu.go.id. Situng KPU ini dibuat guna membuatnya lebih mudah bagi pihak terbuka untuk mendapatkan data hampir terjadi pada perlombaan 2019. Dalam pengaturan Pemilu di Indonesia, *e-recap* dikenal sebagai SITUNG (Kerangka Pemeriksaan Suara). SITUNG telah dipergunakan sejak keputusan tahun 2014 dan masih digunakan dalam kontes 2019, baik dalam keputusan nasional maupun lingkungan. Penggunaan *e-recap* merupakan salah satu metodologi Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna mengendalikan hasil pemungutan suara untuk menjaga jarak strategis dari pemerasan diskresioner. Biasanya kritis karena pengaturan peringkasan suara dianggap sangat penting dibandingkan dengan tahapan lainnya dalam proses pemilu. Dalam kebanyakan kasus, fase ini digunakan untuk menentukan kemenangan atau kekalahan kandidat yang akan datang. Pegangan pernyataan ulang yang panjang dan bertingkat secara teratur menimbulkan keraguan terbuka tentang asah palsu yang mengarah pada keadaan darurat kepercayaan (Mahpudin, 2019). Oleh karenanya, kemunculan SITUNG diharapkan dapat jadi penataan dalam mengatasi permasalahan ini (Cahyaningsih et al., 2019).

Situng ini diperlukan untuk mendorong kerja KPU. Untuk sementara, gabungan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ialah 44,28%. Informasi yang diperlihatkan dalam situng KPU adalah informasi dari filter C1. Informasi mencatat pemungutan suara terjadi di setiap stasiun survei. Munculnya pernyataan ulang pada Situng ditingkatkan dengan rutin, hingga informasi ini tidak akan berganti. Pergi ke KPU Situng juga dibuka, terutama bagi orang-orang yang ingin mengetahui hasil keputusan. Dengan cara ini, KPU meminta keterbukaan untuk gigih jika sulit untuk mencapai kerangka data. Informasi pada Situng dapat dipergunakan oleh anggota keputusan. Di antaranya adalah waktu mengajukan debat pemilu setelahnya ke Pengadilan Dilindungi (MK). Karena untuk berdebat di dalam Pengadilan yang Dilindungi, semua pihak harus memiliki bukti dan informasi yang kuat. Situng KPU bukanlah premis untuk memutuskan keputusan itu terjadi. KPU memutuskan keputusan itu dibuat berdasarkan ringkasan manual multi-level (Medistiara, 2019).

Ketika ada kegagalan dalam pemanfaatan inovasi konstituen, baik disengaja atau tidak disengaja, itu akan menjadi lahan matang untuk para elit politik maupun kandidat yang salah menempatkan perlombaan untuk mengerahkan massa dengan titik membatalkan legitimasi pemilu terjadi (Russell & Zamfir, 2018). Biasanya diafirmasi dalam kasus di Indonesia. Di tengah periode pernyataan ulang pemungutan suara, banyak individu terbuka membahas kemampuan SITUNG. Sebenarnya, itu diambil setelah oleh tantangan massal hingga deklarasi pasangan calon presiden terpilih. Para pendukung calon Prabowo-Sandiaga Uno kurang puas hati dengan perlombaan yang mengumumkan bahwa kemenangan pertandingan calon Jokowi-Amin karena KPU dianggap salah. Protes yang mendorong

agitasi politik telah merenggut nyawa sembilan orang, segelintir penduduk dirugikan, dan sejumlah kantor terbuka dirugikan (Septianto, 2019).

Dalam pemilu berikutnya, KPU tidak mempekerjakan Situng tetapi KPU mengaktualisasikan kerangka kerja, tepatnya Sirekap. Penghapusan istilah Situng dilakukan pada rancangan revisi KPU Kontrol (PKPU) Nomor 9 Tahun 2018 tentang pernyataan ulang tentang pemeriksaan suara pemilu. Sirekap hampir sama dengan Situng seperti yang terhubung dalam Pemilu 2019. Bagaimanapun, Sirekap merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan penanganan peringkasan suara, dimulai dari tingkat Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) (Widowati, 2022). Lebih sering daripada tidak, pernyataan ulang mengatur pekerjaan sangat banyak duplikat kertas, dengan Sirekap pindah ke lanjutan. Terbuka dapat sampai ke pernyataan ulang dari nomor suara Perlombaan Teritorial 2020 melalui situs infopemilu.kpu.go.id resmi. Informasi ringkasan suara di Sirekap pada saat itu dengan cepat tersebar di halaman untuk open get to (Kartika, 2020).

Pergantian sistem Situng telah diimplikasikan pada rancangan perubahan KPU Arahan (PKPU) Nomor 9 Tahun 2018 mengenai ringkasan penghitungan suara ras. Dalam keputusan tahun 2019, Sirekap merupakan salah satu instrumen pelaksanaan penyusunan ulang pemungutan suara dimulai di tingkat kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Sebagai aturan, ringkasan mengatur pekerjaan sangat banyak duplikat kertas, dengan Sirekap pindah ke komputerisasi. Terbuka dapat sampai ke pernyataan ulang yang datang dari pemeriksaan suara Keputusan Teritorial 2020 melalui situs web resmi infopemilu.kpu.go.id. Informasi tentang pernyataan ulang suara di Sirekap pada saat itu segera didistribusikan di halaman untuk terbuka (Kartika, 2020).

Hal ini dapat diperkuat dengan adanya pertanyaan dari Pemikiran Dunia bahwa dari 106 negara yang digunakan sebagai protes penyelidikan, inovasi telah digunakan dalam perlombaan, menghitung inovasi untuk organisasi pengamanan suara, pendaftaran dan konfirmasi pemilih, dan *e-voting* (Wolf et al., 2011). Inovasi e-voting memiliki keuntungan seperti meningkatkan akurasi serta kecepatan dalam perhitungan, mencegah adanya kecurangan, mengurangi anggaran yang sebelumnya digunakan untuk kertas, tempat voting, dll, sehingga dianggap lebih ramah lingkungan. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Brazil, India, Belgia, dan masih banyak lagi, telah mengimplikasikan sistem e-voting selama beberapa dekade, meskipun ada beberapa negara yang tidak berhasil melalui prosesnya (Dewanti, 2019; Risnanto et al., 2020). Pemanfaatan inovasi yang dinilai mampu memberikan kenyamanan dan efektivitas, membuat bangsa-bangsa berbondong-bondong memanfaatkan inovasi dalam keputusan).

Bagaimanapun, pemanfaatan inovasi dalam perlombaan sering menghilangkan pertanyaan yang terkait dengan validitas keputusan muncul (Russell & Zamfir, 2018). Hal ini tidak dapat dipisahkan dari kebenarannya bahwasanya inovasi masih mempunyai kekurangan, seperti keamanan dan masalah kualitas yang tak tergoyahkan. Kekurangan ini secara teratur memiliki saran untuk tingkat kepastian pemilih. Sebenarnya, percaya mungkin merupakan sudut pandang yang sangat penting dalam perlombaan. Tidak mengejutkan, karena kekurangan inovasi ini, beberapa negara telah memilih untuk kembali mengadakan Pemilu rutin karena mereka telah mengalami kekecewaan inovatif yang mengarah pada keadaan darurat kepercayaan dan mungkin membuat bentrokan (Syam, 2024). Belanda dan Jerman adalah kasus pemanfaatan inovasi ras yang gagal dan tidak sempurna yang memperkuat mereka untuk kembali mengadakan pemilihan adat. Sementara itu, pemanfaatan inovasi ras di Negara-negara yang Bergabung masih menimbulkan pembicaraan tajam antara pemerintah dan perlawanan (Setiyono, 2024). Berkaca dari penggambaran ini, pemanfaatan inovasi terkomputerisasi dalam keputusan memiliki poin menarik dan kekurangan, seperti dua sisi uang yang tidak dapat diisolasi. Jika dianalisis di Situng dan Sirekap, keduanya memanfaatkan inovasi dalam pengambilan keputusan tetapi masih ada kekurangan karena pemanfaatan kedua kerangka kerja untuk keputusan pemungutan suara muncul. Selanjutnya, analisis melakukan renungan untuk menganalisis kelangsungan hidup Situng dan Sirekap dalam pegangan lomba di DKI Jakarta.

METODE PENELITIAN

Pertanyaan ini adalah pendekatan yang menggunakan jenis subjektif yang jelas. Investigasi ekspresif bertujuan untuk mengidentifikasi adanya faktor otonom pada salah satu atau lebih faktor tanpa membandingkannya atau berhubungan dengan faktor lain. (faktor otonom adalah faktor otonom, bukan faktor bebas karena jika mereka otonom, mereka terus digabungkan dengan faktor bawahan) (Sugiyono, 2014). Strategi penelitian mungkin merupakan pemikiran komparatif. Penelitian komparatif menunjukkan perbedaan antara dua kelompok berdasarkan variabel tertentu (Fadhillah, 2023). Jadi, pertimbangan komparatif dari renungan ini menganalisis dan membandingkan kelangsungan hidup 2 faktor (Situng) dan (Sirekap) untuk mendesak jawaban atau kenyataan.

Jenis informasi yang diperlukan dalam pertimbangan ini adalah informasi penting dan informasi tambahan. Informasi penting dalam pertimbangan diperoleh dari persepsi dan wawancara yang dilakukan dengan cara khusus dengan saksi penyelidikan. Informasi tambahan diperoleh dari referensi dan data yang bersumber dari web dan lain sebagainya. Untuk mensurvei aksesibilitas dan keterbukaan informasi, penelitian ini mencirikan informasi

keputusan kritis dan mengevaluasi apakah Indonesia mengikuti tolok ukur informasi terbuka terkait informasi keputusan kritis. Definisi komprehensif dari kumpulan data yang dapat dipertimbangkan untuk didistribusikan sebagai informasi ras terbuka telah dibangun oleh Aktivitas Informasi Ras Terbuka. Definisi Open Race Information Initiative menggabungkan informasi spasial dan yang tidak terpikirkan, serta informasi sastra. Dengan definisi ini, pedoman informasi terbuka dapat dihubungkan di semua tahapan siklus keputusan.

Strategi pemeriksaan informasi dalam penelitian ini menggunakan strategi subjektif, khususnya dengan prosedur investigasi: 1) Reduksi Data; 2) pengenalan informasi; 3) menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas merupakan proses dalam menentukan atau mengukur seberapa jauh target yang telah dicapai dengan mempertimbangkan berbagai potensinya (Kurnia, 2023). Kecukupan berkorelasi positif dengan jumlah target yang dicapai. Konsep kecukupan dapat membantu orang menilai bagaimana suatu organisasi berjalan. Memutuskan apakah kerangka dan administrasi organisasi dan program memerlukan perubahan penting adalah salah satu bagian dari konsep ini. Dalam hal ini, kelangsungan hidup adalah pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan produktif dari aset yang dimiliki, diperiksa dalam hal input, bentuk, dan hasil. Dalam hal ini, apa yang tersirat oleh aset termasuk model dan strategi yang digunakan, aksesibilitas tenaga kerja, kantor dan kerangka kerja. Suatu Tindakan dianggap efektif jika sudah teridentifikasi memenuhi kebutuhan yang direncanakan, namun ada kemungkinan sebagian dari rencana tersebut belum efektif. Kecukupan dapat disimpulkan dari pencapaian tujuan, target atau hasil latihan yang telah ditentukan sebelumnya.

1. Efektivitas Situng

a. Akurasi dalam Menentukan Tujuan

Kerangka kerja SITUNG bergantung pada inovasi pemindaian dan sistem web untuk tujuan distribusi. Munculnya pemeriksaan suara di setiap stasiun survei digambarkan dalam catatan resmi dalam bentuk bentuk C1. Ada dua jenis bingkai C1 di tiap stasiun survei. Kedua jenis Frame C1 ditandai oleh pihak terkait yang berbeda, menjadi penyelenggara Pemilu khusus di stasiun survei, saksi atau kandidat partai, bos keputusan, dan layar Pemilu di stasiun survei khusus mereka. Pertama-tama, Formulir Visualisasi C1 disematkan di dalam kotak jajak pendapat untuk memeriksa pernyataan ulang suara secara bertahap. Metode peringkasan suara berlapis pada premis Frame C1 dengan gambar 3d diumumkan sebagai hasil dari mendapatkan

suara substansial berdasarkan arah keputusan yang tepat. Momen, Bingkai C1 tanpa visualisasi mengharapkan saksi atau kandidat partai, bos dan layar Pemilu sebagai bingkai keterusterangan. Bentuk C1 tanpa gambar 3d pada saat itu diberikan dan disatukan ke sekretariat Panitia Penyelenggara Keputusan tingkat Lokal (PPK). Apalagi, PPK memberikannya ke sekretariat KPU masing-masing kabupaten/kota. Dari sini, pegangan penggunaan SITUNG dimulai. Pada saat itu, pengurus dan pekerja di KPU Kabupaten/Kota menginput dan mengecek informasi Bingkai C1 ke web, yang dapat dilihat di laman web yang dimiliki oleh KPU RI.

Jaminan tujuan SITUNG telah diklasifikasikan secara khusus sebagai persiapan yang dapat digunakan untuk memperpanjang perhitungan representasi suara secara bertahap dalam perlombaan berbasis hukum.

b. Ketekunan dalam pengukuran

Kesalahan khusus dalam input informasi di SITUNG disebabkan oleh beberapa variabel (bertemu dengan Ferdana, Staf KPU Aturan Sukoharjo, 25 April 2020): mula-mula, tidak seluruh tulisan CI Frame yang dibuat oleh panitia penyelenggara keputusan di stasiun survei (KPPS, Voting Organizing Gather) pasti dan mudah diperiksa. Akibatnya, ketika pengurus dan pekerja KPU Kabupaten/Kota memasukkan informasi, sering terdapat kegagalan. Seketika, petugas KPPS tidak memasukkan jumlah angka pengadaaan pada Bentuk C1 dengan cermat dan detail. Sebagai ilustrasi, dalam beberapa Bentuk C1, ditemukan bahwa suara kandidat yang direncanakan terisi. Sedangkan jumlah suara substansial kolom, jumlah suara tidak sah terlewatkan untuk diisi. Hal ini berpengaruh pada pelaksanaan pengurus dan perwakilan KPU Kabupaten/Kota yang dipercayakan untuk memberikan informasi melalui aplikasi SITUNG. Arah dan SOP yang ada seperti itu mengharuskan mereka untuk memasukkan dan memeriksa arsip Frame C1 karena tidak melakukan perubahan sekecil apa pun dengan alasan apapun. Sarannya adalah ketika ada arsip C1 yang tidak terisi secara total, input informasi di SITUNG tidak komprehensif. Untuk kasus, catatan C1 sebagaimana adanya menyatakan jumlah suara yang didapat oleh kandidat yang direncanakan, pada saat itu yang didistribusikan di SITUNG adalah seperti masukan kandidat yang mengamankan informasi tanpa masukan jumlah suara substansial dari semua kandidat.

c. Presisi dalam menjalankan perintah

Input khusus arsip Shape C1 dalam aplikasi SITUNG. Ada ketidakteraturan antara tampilan yang disaring dari dokumen Frame C1 dan tampilan input informasi dalam nomor online. Dokumen TPS Bentuk C1 Nomor 093, Kota Bidara Cina, Kawasan

Jatinegara, DKI Jakarta dalam keputusan presiden 2019 muncul bahwa kandidat nomor 1 gabungan Jokowi-Amin mendapatkan 47 suara. Untuk sementara, kandidat nomor 2 gabungan, Prabowo-Sandiaga Uno, mendapat 162 suara. Bagaimanapun, input informasi menunjukkan penyimpangan. Pasangan kandidat nomor 1 Jokowi-Amin itu mendapatkan 180 suara. Sementara itu, kandidat nomor 2 yang digabungkan, Prabowo-Sandiaga Uno, mendapat 56 suara. Menanggapi kekeliruan tersebut, KPU telah memperbaiki data tersebut hingga informasi yang disebarkan di SITUNG sudah dalam pemahaman dengan suara yang didapat dalam arsip Frame C1.

Mengikuti pilihan Bawaslu, KPU memperbaiki kekeliruan input informasi dan menunjukkan beberapa penjelasan yang disebarkan di situs SITUNG sebagai kerangka penafian, khususnya (1) input informasi SITUNG karena didasarkan pada angka yang disusun pada duplikat Bentuk C1 yang diperoleh KPU Kabupaten/Kota dari KPPS; (2) dalam hal ada kesalahan dalam mengisi informasi pada Bentuk C1, dapat disesuaikan dengan rekapitulasi terbuka seluruh rapat di tingkat kecamatan; (3) dalam hal terdapat penyimpangan dalam informasi input di SITUNG dengan filter duplikat Frame C1 dapat diperbaiki sesuai dengan apa yang disusun dalam Duplikat Frame C1; dan (4) informasi yang ditampilkan di SITUNG bukanlah hasil resmi dari pernyataan ulang pemungutan suara. Jaminan pernyataan ulang substansial terjadi dilakukan secara bertahap.

Meskipun KPU telah menyesuaikan kesalahan dalam input informasi SITUNG dan membuat penafian, masalah ini tidak berhenti secara fundamental. Kesalahan input data SITUNG yang berbeda ditemukan di stasiun survei yang berbeda di banyak distrik telah mengaktifkan pertanyaan terbuka seputar keputusan yang muncul. Ada anggapan yang progresif di dalam masyarakat bahwa KPU salah dan tidak memihak. Biasanya tidak dapat dihindari karena kesalahan dalam informasi input SITUNG akan memengaruhi penelitian otak pemilih yang mendukung kandidat yang akan segera datang dan merasa putus asa dengan kesalahan ini. Kecurigaan KPU melakukan pemerasan semakin membumi. Keyakinan terbuka yang mulai goyah dipolitisasi oleh kandidat yang merasa telah salah tempat dalam tantangan konstituen untuk mendelegitimasi perlombaan muncul di bawah kasih sayang bahwa KPU tidak memihak karena banyak kegagalan. Sarannya adalah bahwa periode penghitungan suara yang diungkapkan kembali meningkatkan tekanan politik.

2. Efektivitas Sirekap

a. Akurasi Pengukuran

Ketepatan estimasi dalam penggunaan keputusan presiden 2024 rumit pada tingkat kepercayaan terbuka, khususnya peristiwa perluasan suara. Gelembung suara terjadi karena kesalahan dalam membaca filter yang muncul oleh kerangka kerja di Sirekap. Cara memanfaatkan aplikasi Sirekap, petugas KPPS mengambil foto bingkai Hasil C secara langsung melalui aplikasi serbaguna Sirekap di telepon genggam, pada saat itu semua arsip akan dicek ke dalam catatan komputerisasi, pada saat itu dikirim ke server KPU pusat menggunakan teknologi *Optical Character Acknowledgment* (OCR) dan *Optical Stamp Acknowledgment* (OMR). Server akan membaca dengan teliti pemeriksaan yang terjadi dan kemudian mengulangi arsip. Bagaimanapun, dalam membaca dengan teliti yang dicek yang disusun di atas kertas, kemampuan Sirekap untuk menangkap dan mempelajari yang diperiksa masih terbatas. Perbedaan dalam tulisan tangan yang dicatat pada kertas C datang terlalu berubah. Akibatnya, Sirekap akan menimbulkan kesalahan karena kontras dalam penjelasan dan informasi yang diklaim oleh server Sirekap itu sendiri. Penggunaan Sirekap dapat meningkatkan kemungkinan kebutuhan keterusterangan karena kontrol informasi dan instrumen pemeriksaan yang layak. Kontrol dan perampokan ras datang tentang informasi dapat mempengaruhi ketajaman dan legitimasi keputusan yang muncul.

b. Akurasi Eksekusi Perintah

Aset manusia yang dibutuhkan untuk memanfaatkan aplikasi Sirekap terlebih lagi harus dapat memanfaatkan aplikasi Sirekap secara sah dan akurat. Cara tawar-menawar dengan aplikasi Sirekap yang mengalami gangguan atau masalah saat menggunakannya di lapangan. Beberapa waktu baru-baru ini menggunakan aplikasi Sirekap, arahan khusus adalah mulai diberikan kepada individu KPPS, terutama bagi petugas yang akan menggunakan aplikasi Sirekap. Untuk menghindari kegagalan lainnya, setiap KPPS memiliki 2 petugas yang akan memanfaatkan aplikasi Sirekap. Arahan khusus tentang pelaksanaan keputusan juga dilakukan untuk memberikan kursus kepada semua individu KPPS tentang metode pelaksanaan latihan Pemilu. Pengawas Program Senior dari The Worldwide Founded for Majority rule government dan Constituent Help (Thought) merekomendasikan agar penyelenggara lomba di setiap lokal menerima pelatihan tentang Sirekap. Dan itu membutuhkan persiapan dan arahan tanpa henti. Persiapan harus diberikan kepada petugas beberapa waktu baru-baru ini perlombaan diadakan. Kebenaran di

lapangan, Sirekap mempersiapkan diberikan waktu 5 hari hingga 3 hari beberapa saat terakhir lomba digelar. Akomodasi nama pengguna dan kata rahasia Sirekap apalagi diberikan H-3 menjelang pemilihan presiden. Pada saat itu, administrator Sirekap yang berjumlah 2 orang di setiap KPPS akan masuk dengan nama pengguna dan kata sandi khusus mereka.

Di tengah keputusan presiden 2024, pemanfaatan aplikasi Sirekap dipandu melalui kumpulan whatsapp aplikasi. Jika tidak dapat diatasi dengan aturan tersebut, KPPS tingkat kecamatan sebagai pihak yang memiliki kendali penuh atas rekening Sirekap akan membantu melalui zoom untuk mengungkap masalah pemanfaatan aplikasi Sirekap. Masalah ini berbeda, mulai dari akun yang tidak dapat dibuka, kata sandi di luar dasar, kata sandi yang diabaikan, ponsel serbaguna yang tidak kompatibel, mengatur gangguan atau akun yang tidak muncul setelah login berhasil. Dalam posisi ini, aset manusia yang menggunakan aplikasi Sirekap merasa kesulitan untuk menggunakannya. Ada kekacauan karena tidak ada pengaturan yang tepat dan jelas untuk setiap masalah yang terjadi.

c. Akurasi dalam menentukan Tujuan

Bisa dilihat dari hasil akhir apakah Sirekap akhirnya mencapai tujuannya. Sementara pemanfaatan inovasi dapat menawarkan bantuan untuk memajukan produktivitas, keamanan dan keterusterangan harus menjadi kebutuhan terbaik dalam pemanfaatannya untuk menjamin ketajaman ras berbasis hukum.

Kelangsungan hidup dari dua bentuk kerangka pemungutan suara (SITUNG dan SIREKAP) masing-masing memiliki keunggulan dan hambatan di tengah metode perhitungan terjadinya proses perlombaan di DKI Jakarta. Penggunaan SITUNG dalam proses pernyataan ulang pemungutan suara menjadi dapat diperdebatkan karena ada kesalahan khusus yang dibuat oleh penyelenggara keputusan dalam persiapan memasukkan informasi ke SITUNG, mengaktifkan pertanyaan terbuka dan keraguan. Dimanfaatkan oleh para kandidat dan elit politik, mereka menggunakan momentum ini untuk memobilisasi massa, menimbulkan keraguan yang akhirnya menyebabkan upaya untuk mendukung keputusan yang diambil. Di tengah periode pasca kebenaran, yang diindikasikan dengan dekatnya masalah negatif dan *hoax* yang memanfaatkan media sosial, hal ini dapat semakin diperkeruh. Pemanfaatan Sirekap dalam keputusan presiden 2024 dapat dilihat dari kondisi geologis. Indonesia yang merupakan negara kepulauan, dengan zona topografi yang membentang dari rawa hingga pegunungan, pulau-pulau dan pegunungan yang lebih jauh yang masih banyak terbelakang dan terhalang sehingga untuk penyebaran sistem transmisi web

dan media masih banyak kekurangan. Banyak rentang masih belum tersentuh oleh web, meskipun sampai sekarang ada organisasi, itu masih dalam skala moo. Untuk penggunaan Sirekap yang stabil, diperlukan jaringan online dengan kualitas 4G. Untuk sementara, untuk rentang yang terhambat, pengaturan web masih sulit untuk diakses.

Untuk mendorong analisis efektivitas, dilakukan tabel beton dalam bentuk tabel beton hasil akhir dari penyelidikan kecukupan SITUNG dan SIREKAP dalam perlombaan persiapan di DKI Jakarta 202 :

Tabel 1. Efektivitas SITUNG dan SIREKAP

Komponen Efektivitas	SITUNG	SIREKAP
Akurasi Pengukuran	Dalam proses pengukuran, SITUNG cenderung melakukan kesalahan selama <i>proses input</i> , yang disebabkan oleh 2 faktor, yaitu: Tidak semua Formulir CI yang ditulis tangan oleh panitia penyelenggara pemilu di TPS Petugas KPPS tidak mencatatkan jumlah angka perolehan pada Formulir C1 dengan cermat dan rinci	Dalam proses pengukuran untuk mengetahui keakuratan pengukuran, cara menggunakan aplikasi Sirekap, petugas KPPS mengambil foto Hasil formulir C secara langsung melalui aplikasi mobile Sirekap di ponsel, kemudian semua dokumen akan dipindai menjadi dokumen digital, kemudian dikirim ke server pusat KPU memanfaatkan teknologi <i>Optical Character Recognition</i> (OCR) dan <i>Optical Mark Recognition</i> (OMR). Server akan membaca hasil pemindaian dan kemudian secara otomatis merangkum dokumen.
Akurasi dalam menentukan tujuan	Penetapan tujuan SITUNG telah diklasifikasikan secara langsung dengan proses yang dapat digunakan untuk meningkatkan perhitungan rekapitulasi suara	hasil akhirnya adalah apakah Sirekap akhirnya mencapai tujuannya. Sementara penggunaan teknologi dapat membantu meningkatkan

Komponen Efektivitas	SITUNG	SIREKAP
	secara bertahap dalam pemilu demokratis	efisiensi, keamanan dan transparansi harus menjadi prioritas utama dalam penggunaannya untuk memastikan integritas pemilu yang demokratis
Akurasi dalam menjalankan perintah	Dalam hal eksekusi perintah, SITUNG lebih banyak melakukan kesalahan berupa ketidakkonsistenan pada tampilan <i>scan</i> dokumen Formulir C1 dan pada tampilan input data dalam perhitungan <i>online</i> . Formulir C1 dokumen TPS Nomor 093, Desa Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, DKI Jakarta pada Pilpres 2019 membuktikan bahwa suara yang diperoleh pasangan calon nomor 1 Jokowi-Amin adalah 47 suara	Sebelum menggunakan aplikasi Sirekap, bimbingan teknis diberikan terlebih dahulu kepada anggota KPPS, terutama bagi petugas yang akan menggunakan aplikasi Sirekap. Untuk mencegah kesalahan lainnya, setiap KPPS memiliki 2 petugas yang akan menggunakan aplikasi Sirekap. Bimbingan teknis pelaksanaan pemilu juga dilakukan untuk memberikan arahan kepada seluruh anggota KPPS mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pemilu. Manajer Program Senior Institut Internasional untuk Demokrasi dan Bantuan Pemilu (IDEA) menyarankan agar penyelenggara pemilu di setiap daerah menerima pelatihan tentang Sirekap.

SIMPULAN

Berdasarkan dialog di atas, dari 8 penanda estimasi efektivitas, analisis diukur dengan 3 petunjuk yang memahami dengan wacana yang ada. Sirekap dan Situng digunakan dalam memahami alasan mereka, secara spesifik untuk membantu mempercepat pengumpulan

pernyataan ulang dan pekerjaan keterusterangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Sirekap belum berhasil dimanfaatkan dalam latihan Pemilu. Karena masih membutuhkan peningkatan yang sangat besar agar semua kekurangan dapat diatasi secara instan. Jika masih banyak masalah yang belum dapat diatasi, KPU tidak perlu memaksakan pemanfaatan Sirekap. KPU menyadari bahwa Sirekap tidak siap untuk dijadikan alat perhitungan resmi untuk menggantikan pegangan manual. Dan jika KPU masih perlu memanfaatkan inovasi, maka kerangka perhitungan dapat dibuat menjadi lebih unggul dengan e-voting karena dengan Sirekap menyiratkan bahwa KPU menggunakan dua kerangka kerja, manual dan elektronik. Perlombaan dilanjutkan dengan persiapan manual, untuk pemungutan suara khusus dan masih menggunakan kertas. Tetapi e-voting menggunakan instrumen pemilihan yang terlebih lagi mampu menghitung jumlah suara yang dapat dipuji dari distribusi dalam buku harian

Politisasi masalah ini terus dilakukan, yang mengarah pada pertunjukan. Selain itu, pihak yang kalah dalam perlombaan cenderung terus merasa kecewa dan meragukan perlombaan yang terjadi dan mengecam lembaga keputusan pemerasan (Russell & Zamfir, 2018). Penetapan Keputusan Presiden 2019 menjadi lebih rumit karena penegasan pemerasan keputusan semakin kuat ketika terjadi kesalahan khusus dalam masukan SITUNG dan SIREKAP yang dilaksanakan oleh petugas KPU. Hal ini mencerminkan bahwasanya kemenangan dan kekecewaan implementasi inovasi keputusan, dalam hal ini SITUNG tidak seperti itu tergantung kepada kemajuan inovasi, namun juga pengaturan politik-sosial yang terutama.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyaningsih, A., Wijayadi, H., & Kautsar, R. (2019). Penetrasi Teknologi Informasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018. *Jurnal PolGov*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.22146/polgov.v1i1.48289>
- Dewanti, S. C. (2019). Wacana Penggunaan E-Voting Pada Pemilu. *INFO SINGKAT: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 11(10), 25–30.
- Fadhillah, N. R. (2023). Perbedaan Kesehatan Mental pada Mahasiswa dari Daerah Asal Jawa Tengah dan NTB: Studi Komparatif. *Jurnal Sosiologi Dan Filsafat*, 1(2), 93–100.
- Kartika, M. (2020). *KPU ganti Situng dengan Sirekap*. Republika.Id. <https://www.republika.id/posts/11423/kpu-ganti-situng-dengan-sirekap>
- Kurnia, L. (2023). *Efektivitas Komunikasi Verbal & Nonverbal dalam Penggunaan Edlink Pada Proses Perkuliahan di IAIN Parepare*. Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Mahpudin. (2019). Teknologi Pemilu, Trust, dan Post Truth Politics: Polemik Pemanfaatan

- SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara) Pada Pilpres 2019. *Jurnal PolGov*, 1(1), 157–197. <https://doi.org/10.22146/polgov.v1i2.55886>
- Medistiara, Y. (2019). *Sambang MK, TKN Konsultasi Soal Jadi Pihak Terkait Sengketa Pilpres*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-4566560/sambang-mk-tnk-konsultasi-soal-jadi-pihak-terkait-sengketa-pilpres>
- Risnanto, S., Rahim, Y. B. A., Herman, N. S., & Abdurrohman. (2020). E-Voting readiness mapping for general election implementation. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 98(20), 3280–3290.
- Russell, M., & Zamfir, I. (2018). *Digital technology in elections: Efficiency versus credibility?* EPRS European Parliament.
- Septianto, B. (2019). *Sidang di Bawaslu, KPU membantah tuduhan BPN manipulasi Situng*. Tirto.id. <https://tirto.id/sidang-di-bawaslu-kpu-bantah-tuduhanbpn-soal-manipulasi-situng-dt6j>
- Setiyono, B. (2024). *Model dan desain negara kesejahteraan*. Nuansa Cendekia.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syam, H. D. (2024). *Generasi milenial dan partisipasi politik tahun 2024*.
- Widowati, D. N. (2022). *Model penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Masa Pandemi Wabah Penyakit Menular*. Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
- Wolf, P., Nackerdien, R., & Tuccinardi, D. (2011). *Memperkenalkan pemungutan suara elektronik: Pertimbangan penting (Makalah kebijakan)*. International IDEA.